

## **Analisis Disparitas Ekonomi Wilayah Jabodetabek Pada Masa Pandemi Covid 19**

**Taufik Hidayadi<sup>1</sup> dan Achmad Mukafi Niam<sup>2</sup>**

<sup>1</sup> Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, [taufik@unusia.ac.id](mailto:taufik@unusia.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, [mukafi@unusia.ac.id](mailto:mukafi@unusia.ac.id)

### **ABSTRACT**

*Disparity and the economy has become an important discussion for economic scientists and development policy makers. Both as an evaluation material for planning and as part of the implementation of the development itself. Currently, with the Covid-19 pandemic, economic problems is a serious concern. This study tries to look at the economic conditions in the Jabodetabek area during the 2020 pandemic with the Williamson index and Klassen Typology. In 2020, it can be seen that the Williamson Index, when the pandemic occurred, decreased from 0.71 to 0.66 or decreased by 0.05 points, as a result of cross section data at the end of the year. This could be due to a decrease in income in certain groups or the type of data used. In the Klassen typology calculation, most of the regions are in quadrant III, it is possible that most regions experienced a significant decrease in GRDP. Quadrant IV is mostly filled by cities in Jakarta minus East Jakarta. This quadrant is possible due to the heavy burden of minus growth with economic conditions experiencing contraction due to tightening activities by the government. Initial research on the economy is expected to be continued with deeper research for economic evaluation after the Covid 19 pandemic and the end of development planning in Jabodetabek.*

**Keyword:** *Disaparity, Covid19, Jabodetabek*

### **PENDAHULUAN**

Indonesia telah melaksanakan pembangunan nasional sejak kemerdekaan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Meskipun dilanda berbagai persoalan, baik sosial politik, atau ekonomi, namun dalam perjalanannya terjadi peningkatan pendapatan nasional yang diukur dalam *gross domestic product* (GDP). Persoalan yang dihadapi adalah terjadinya kesenjangan antardaerah dalam bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan maupun ketimpangan dalam distribusi pendapatan. (Taufik Hidayadi 2003). Terdapat perbedaan antara ketimpangan ekonomi antardaerah dengan ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan antardaerah diukur dengan produk domestik regional bruto (PDRB) per kapita sedangkan ketimpangan distribusi pendapatan diukur dengan Rasio Gini. Salah satu metode yang sering digunakan untuk mengukur ketimpangan antardaerah adalah indeks Williamson. Indeks ini adalah koefisien variasi yang digunakan untuk mengukur perbedaan dalam ilmu statistik. Indeks Williamson berada dalam rentang 0 sampai dengan 1. Jika mendekati 0, maka ketimpangan antardaerah berada dalam kondisi rendah, namun jika nilai indeks mendekati 1, maka tingkat ketimpangan antardaerah tinggi.

Ketimpangan antardaerah merupakan hal yang umum terjadi di banyak tempat, bukan hanya di negara berkembang, tetapi juga di negara maju (Muhammad Firdaus, 2013). Kesenjangan muncul akibat perbedaan sumber daya alam, lokasi, demografi atau faktor lainnya menimbulkan implikasi lanjutan berupa terjadinya disparitas antara daerah yang sudah maju dan yang masih terbelakang. Jika tidak dikelola dengan baik, hal ini menimbulkan kecemburuan sosial yang timbul yang akhirnya bisa berdampak pada kondisi sosial politik masyarakat yang tidak kondusif.

Persoalan tersebut disadari oleh para pengambil kebijakan, namun untuk mengatasinya bukan hal yang mudah. Secara bersama-sama pemerintah pusat dan daerah menjalankan agenda pembangunan sesuai dengan wewenang yang telah ditetapkan oleh undang-undang (Dhyatmika dan Atmanti 2013). Selain itu, upaya tersebut dapat dilakukan melalui kerja sama atau kemitraan dengan pihak swasta yang nantinya dapat merangsang pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan menciptakan lapangan kerja baru (Arsyad 2010). Studi kasus pada pemekaran provinsi Banten selama rentang waktu 2001-2011 didapati terjadinya proses pembangunan namun hal tersebut disertai dengan peningkatan ketimpangan antardaerah. Kota Cilegon dan Kota Tangerang masuk kategori maju dan cepat berkembang, Kabupaten Tangerang masuk kategori daerah yang berkembang cepat sementara kabupaten-kabupaten lainnya masuk kategori daerah tertinggal. (Dhyatmika dan Atmanti, 2013).

Strategi pembangunan mengasumsikan bahwa pertumbuhan dan pemerataan tidak dapat dicapai sekaligus. Salah satu pendekatan yang banyak digunakan adalah *trickle down effect* atau efek cucuran ke bawah dengan mengutamakan pertumbuhan dahulu untuk memperbesar kue ekonomi supaya nantinya bisa dibagi ke banyak kelompok dalam porsi yang lebih besar. Namun, ternyata hal tersebut tidak berjalan sesuai dengan harapan atau berjalan dengan sangat lambat. Kelompok yang sudah menguasai kue ekonomi cenderung memperbesar porsi kue ekonomi yang telah dikuasai, bukan membagi dengan kelompok lainnya. Menurut Lincoln Arsyad (2010), kebijakan pembangunan yang hanya menekankan pertumbuhan ekonomi yang tinggi hanya memberi sedikit manfaat bagi pengurangan kemiskinan. Banyak penduduk yang masih terjatuh dalam kemiskinan absolut. Hanya daerah-daerah tertentu yang menjadi pusat pertumbuhan sementara daerah lainnya tetap tertinggal.

Dalam upaya untuk memutus mata rantai penularan Covid-19 negara-negara di seluruh dunia melakukan kebijakan pembatasan bepergian ke dalam zona merah Covid-19. Indonesia juga menerapkan kebijakan yang sama. (Nasution, Erlina, dan Muda 2020). Selain kebijakan pembatasan bepergian, pemerintah Indonesia juga menerapkan pola kehadiran 50 persen atau 75 persen di tempat kerja, sarana pendidikan, termasuk tempat ibadah. Kebijakan pembatasan memiliki dampak yang berbeda-beda pada setiap daerah karena tergantung pada sektor ekonomi yang mendominasi. Pada daerah yang memiliki sektor industri yang karyawannya dapat melakukan pekerjaan dari rumah, maka dampak yang ditimbulkannya berbeda dengan daerah yang pekerjaannya mesti dilakukan dari kantor. Selain itu rantai pasok memengaruhi kebutuhan bahan baku yang mesti disiapkan untuk memenuhi kebutuhan yang diperlukan. (Palomino, Juan C. and Rodriguez, 2021)

Penelitian ini ditujukan untuk menelaah kesenjangan antardaerah di Jabodetabek selama periode pandemi Covid-19 tahun 2020. Ada banyak faktor yang mempengaruhi pembangunan sebuah daerah seperti struktur sosial, sikap masyarakat, dan kebijakan lembaga nasional sebagai upaya untuk percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan (Todaro and Smith 2012).

## TINJAUAN PUSTAKA

### Disparitas Ekonomi

Terdapat lima faktor yang menjadi penyebab ketimpangan antardaerah, yaitu perbedaan kandungan sumber daya alam; perbedaan kondisi demografis; kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa; konsentrasi kegiatan ekonomi daerah; dan alokasi dana pembangunan antardaerah. (Syafriзал, 2018). Kondisi demografis meliputi ukuran, struktur, dan distribusi penduduk yang di dalamnya meliputi tingkat pendidikan, kesehatan, usia, dan lainnya. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan memiliki tingkat produktivitas yang tinggi. Hal ini akan mendorong terjadinya peningkatan investasi yang selanjutnya akan menciptakan lapangan kerja baru. Dengan demikian, daerah seperti ini akan memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Akses untuk mobilitas barang dan jasa juga mempengaruhi ketimpangan antardaerah. Pada wilayah yang infrastruktur transportasinya kurang, maka biaya untuk mendistribusikan barang dan jasa menjadi mahal sehingga produk dan jasa yang dihasilkan tidak kompetitif dengan daerah lainnya. Kombinasi berbagai faktor seperti ketersediaan sumber daya alam, kondisi demografi, dan mobilitas akhirnya akan menimbulkan daerah-daerah konsentrasi pertumbuhan yang dari waktu ke waktu semakin timpang dengan daerah lainnya. Selanjutnya, kebijakan alokasi dana pembangunan memengaruhi tingkat pertumbuhan. Daerah yang mendapat alokasi dan pembangunan yang tinggi akan bertumbuh lebih cepat. Kebijakan desentralisasi pembangunan merupakan upaya untuk mendorong investasi pemerintah di daerah. Sementara itu, keputusan investasi oleh sektor swasta ditentukan oleh kekuatan pasar, yaitu keuntungan lokasi, termasuk di dalamnya keuntungan aglomerasi.

Jakarta mengalami proses aglomerasi yang kian luas seiring kian meningkatnya proses industrialisasi di Indonesia yang berpusat secara bipolar di Jakarta dan Surabaya. Pada tahun 1980 daerah aglomerasi utama di wilayah metropolitan yang meliputi Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Pada 1990 aglomerasi telah berkembang ke daerah di sekitar metropolitan utama yang meliputi Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Kabupaten Bogor, Kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Tahun 2000 aglomerasi semakin meluas mencakup 13 kabupaten kota termasuk Kota Bekasi, Kota Tangerang, Karawang, Purwakarta, dan Serang. Hal ini akhirnya membentuk koridor kota-kota yang menghubungkan Jakarta Bandung. (Kuncoro, 2019).

Keuntungan aglomerasi merupakan keuntungan yang diperoleh karena kegiatan ekonomi terkumpul pada suatu tempat tertentu sehingga terjadi penghematan ekonomi karena ketersediaan bahan baku, penghematan ongkos transportasi, penggunaan fasilitas bersama, atau faktor lainnya. Besarnya keuntungan aglomerasi tergantung pada keterkaitan antarindustri yang berada dalam satu lokasi tersebut (Syafriзал, 2018). Pertumbuhan di satu daerah dapat memiliki dua dampak ke daerah sekitarnya, yaitu divergensi di mana pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan ketimpangan. Konvergensi terjadi ketika pertumbuhan ekonomi akan mengurangi ketimpangan antardaerah. Pada daerah yang mengalami konvergensi, maka strategi ekonomi yang dilakukan adalah mengejar pertumbuhan sementara daerah yang mengalami divergensi, maka strateginya adalah pemerataan.

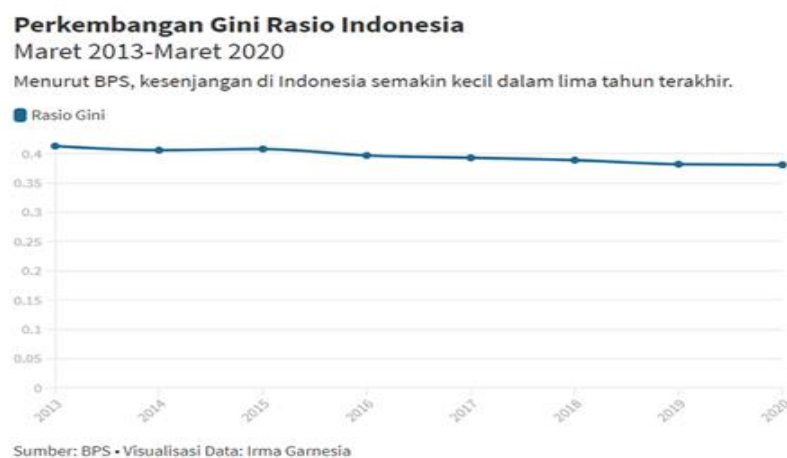
Pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidak hanya berdiri sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah sekitarnya. Modi dan Wang dalam

Aida (2012) menjelaskan bahwa pertumbuhan industri pada suatu wilayah dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain adanya efek limpahan dari daerah sekitar. Konsep limpahan dapat menimbulkan dampak sebar (*spread effect*) yang mana pertumbuhan ekonomi dapat menimbulkan penyebaran pertumbuhan ke daerah sekitarnya sementara dampak balik (*backwash effect*) terjadi ketika pertumbuhan ekonomi menyerap sumber daya yang ada di sekitarnya.

### Ketimpangan di Indonesia

Muhammad Firdaus (2013) mengutip Lessmann menyatakan bahwa ketimpangan pendapatan wilayah di Indonesia merupakan yang terburuk dibandingkan dengan beberapa negara maju dan negara dan berkembang. Posisinya lebih buruk dari China dan Thailand yang memiliki ketimpangan tinggi antarwilayahnya. Pada 2011, rata-rata rasio PDRB per kapita provinsi di Pulau Jawa lebih tinggi 300 persen dari provinsi di Sulawesi, Nusa Tenggara, dan Maluku. Dengan kondisi seperti itu, diperlukan waktu sekitar 200 tahun bagi wilayah di Indonesia Timur untuk bisa mengejar ketertinggalan dari Indonesia Barat jika proses tersebut berlangsung secara alamiah. Di dalam Pulau Jawa pun terjadi ketimpangan PDRB tinggi, yang mana pembangunan terkonsentrasi di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya.

Menurut pendekatan mazhab neoklasik, ketimpangan ekonomi lambat laun akan hilang seiring dengan terjadinya pembangunan. Namun, dalam pendekatan baru seperti teori cumulative causation, new economic geography, perkembangan yang terjadi bisa sebaliknya atau sifatnya situasional. Hal ini dikarenakan adanya faktor hambatan fisik dan sosial yang membatasi mobilitas produksi. Aglomerasi yang melahirkan efisiensi menyebabkan industri tertentu berkumpul di satu lokasi untuk mengejar efisiensi. Dengan demikian, daerah yang kaya dapat menjadi semakin kaya sementara daerah miskin menjadi semakin miskin. Wilayah yang kurang berkembang dapat terjebak dalam lingkaran setan yang mana pendapatan rendah mengakibatkan daya beli yang rendah dan tabungan rendah. Selanjutnya, keterbatasan tabungan menyebabkan rendahnya investasi untuk mengembangkan pasar yang mengakibatkan rendahnya produktivitas. Jika produktivitas rendah, maka pendapatan masyarakat rendah. Lingkaran setan terjadi secara terus menerus seperti itu.



Gambar 1. Perkembangan Gini Ratio di Indonesia

Jika diukur dengan Rasio Gini, kesenjangan pendapatan di Indonesia mengalami peningkatan pada periode saat ini dibandingkan dengan tahun 1990an. Rasio ini berada pada rentang antara 0 sampai 1 yang mana 0 menunjukkan adanya pemerataan sempurna sedangkan 1 menunjukkan kesenjangan sempurna. (BPS RI 2021). Pada 1996 Rasio Gini Indonesia 0,36, namun pada 2011 terjadi peningkatan sehingga menjadi 0,41. Hingga tahun 2015, Rasio Gini masih 0,41. Pemerintah dan berbagai pihak lainnya terus berupaya melakukan penurunan ketimpangan tersebut. Pada 2016 Rasio Gini telah turun menjadi 0,40 dan sampai Maret 2020, Rasio Gini mencapai 0,381.

Oxfam dalam laporannya pada 2017 menggunakan pendekatan lain dalam melihat kesenjangan. Mengutip laporan Credit Suisse, Oxfam menyebut harta empat orang paling kaya di Indonesia mencapai USD25 miliar. Jumlah tersebut setara dengan harta kekayaan 100 juta penduduk miskin Indonesia yang senilai USD24 miliar. Riset yang dilakukan oleh Credit Suisse juga mencakup ketimpangan kekayaan di negara-negara ASEAN. (Garnesia 2020). Dalam hal ini, Indonesia menduduki peringkat kedua sebagai negara paling timpang di ASEAN. Laporan Credit Suisse pada 2019 tak menunjukkan terjadinya perubahan proporsi kekayaan yang signifikan dari periode sebelumnya.

### **Wilayah Jabodetabek**

Seiring dengan perkembangannya yang pesat serta dengan semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi, beberapa kota besar di Indonesia secara alamiah menjadi kawasan-kawasan metropolitan. Kawasan ini salah satunya terbentuk melalui bersatunya beberapa kota atau daerah administratif yang berdekatan menjadi kawasan perkotaan yang besar atau yang dikenal sebagai konurbasi antara kota inti dengan kota-kota sekitarnya. Fenomena ini sering disebut sebagai metropolitan, extended metropolitan atau pun megalopolis (Pontifex and Silitonga 2010).

Wilayah Jabodetabek merupakan wilayah metropolitan yang meliputi ibu kota negara DKI Jakarta dan daerah-daerah tingkat II lainnya yang sekarang menjadi bagian dari provinsi Jawa Barat dan Banten. Jabodetabek bisa dikatakan dalam satu kesatuan integrasi unik yang melintasi batas-batas administrasi tata kelola pemerintahan. Bahkan ada instansi yang cakupan wilayah kerjanya melewati batas administrasi pengelolaan wilayah, yaitu seperti Kepolisian Daerah DKI Jakarta yang membawahi wilayah Kota Depok dan Kota Bekasi, di mana kedua wilayah tersebut merupakan bagian dari provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Ada pula institusi perbankan yaitu Bank Jabar Banten yang kepemilikan dan operasinya dikendalikan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Banten. Untuk legalitas pembentukan kawasan Jabodetabek pemerintah mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No 151 tahun 1975 tentang perubahan dan pembulatan batas wilayah. Dalam beberapa kondisi, sebagai daerah yang menjadi pusat kekuasaan politik dan ekonomi, wilayah Jabodetabek mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah soal pembangunannya. Terdapat sejumlah program pembangunan khusus yang didukung oleh pemerintah pusat untuk memperlancar kegiatan yang ada di wilayah ibu kota dan sekitarnya.

Integrasi antara Jakarta dan wilayah sekitarnya yang masuk ke provinsi Banten, yaitu Tangerang dan Tangerang Selatan, dan Provinsi Jawa Barat, yaitu Bogor, Bekasi, dan Depok,

diatur dalam PP No. 26 Tahun 2008. Dari data BPS menunjukkan bahwa kawasan Jabodetabek tahun 2008 dan 2012, sektor tersier memberikan kontribusi paling besar dalam pertumbuhan PDRB. (Pratiwi and Muta'ali 2013). Jakarta telah menjadi pusat kegiatan perekonomian nasional sekaligus akses ke pasar internasional, sedangkan daerah di sekitarnya menjadi penyangga kegiatan ekonomi. Sektor tersier tumbuh dengan cepat di wilayah yang perekonomiannya sudah maju. Sementara itu wilayah di sekitarnya menjadi pendukung proses kemajuan

### **Pandemi Covid-19**

Pandemi Covid-19 membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam melakukan konsumsi. Mereka menahan diri dari membelanjakan uangnya, kecuali untuk hal-hal yang dianggap kebutuhan primer. Kondisi ini membuat perekonomian mengalami perlambatan. Bahkan tahun 2020 terjadi pertumbuhan negatif sebesar 2,07%. Proyeksi industri yang dibuat untuk tahun 2020 mengalami perubahan drastis akibat kejadian luar biasa yang tak disangka-sangka itu. Para investor pun bersikap lebih berhati-hati dengan mengamankan modalnya karena adanya perubahan asumsi pasar dan tidak jelasnya rantai pasok (Pepinsky and Wihardja 2011). Dalam situasi seperti ini, maka pihak yang paling terdampak adalah kelompok rentan, yaitu orang miskin, pekerja serabutan, atau pelaku UMKM. Negara miskin juga lebih rentan mengalami dampak buruk akibat pandemi dibandingkan dengan negara kaya.

Oxfam, organisasi internasional non-pemerintah yang bergerak dalam isu pembangunan, penanggulangan bencana, dan advokasi dalam laporannya pada Oktober 2020 "Fighting Inequality in The Time of COVID-19" menyampaikan bahwa Covid-19 menimbulkan dampak sangat besar kepada negara yang tidak siap menangani pandemi. Hanya ada satu dari enam negara yang mengalokasikan anggaran yang cukup untuk bidang kesehatan; hanya sepertiga angkatan kerja global yang mendapatkan perlindungan sosial yang cukup memadai; di seratus negara di dunia, sepertiga pekerjaanya tidak memiliki perlindungan kerja ketika sakit. Akibatnya ketika terjadi masalah kesehatan, terdapat biaya ekonomi yang harus ditanggung untuk proses pemulihan atau akibat berhenti kerja. Situasi ini telah menyebabkan peningkatan kesenjangan ekonomi.

### **Penelitian Terdahulu**

WHO pada 2018 menyampaikan terdapat cukup bukti yang menyatakan bahwa semakin rendah posisi sosial ekonomi seorang individu, semakin tinggi risiko kesehatannya memburuk. ketidaksetaraan tersebut memiliki biaya ekonomi dan sosial yang signifikan untuk individu dan masyarakat. Ginsburgh dkk (2021) dalam penelitian antardaerah di Perancis menemukan bukti bahwa sebagian besar krisis cenderung meningkatkan ketimpangan lebih lanjut, karena orang yang relatif lebih miskin kurang sehat, memiliki lebih banyak pekerjaan berisiko, kredit dibatasi, lebih berisiko kehilangan pekerjaan karena alasan mikro dan makro, dan memiliki jaringan sosial yang kurang kuat untuk digunakan kembali. Guncangan sementara, seperti Covid-19, cenderung memiliki efek permanen pada ketidaksetaraan ini, dan bahkan dapat memiliki konsekuensi antargenerasi.

Gozzi dkk (2021) dalam penelitiannya di Chile menemukan bahwa dampak non-pharmaceutical interventions (NPI) pada mobilitas individu berkorelasi dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pada daerah yang lebih maju dan kaya, penduduknya lebih

mampu mengisolasi diri sehingga bisa mengurangi risiko terkena Covid-19 dan mengalami beban pandemi yang jauh lebih rendah. Para pekerja yang tidak dapat melakukan *work from home* (WFH) semakin terdampak pekerjaannya terhadap Covid-19. Sektor yang paling terdampak adalah hospitality, restoran, dan entertainment

Penelitian yang dilakukan oleh Jack Cordes dan Marcia C. Castro (2020) tentang analisis spasial klaster-klaster Covid-19 dan faktor-faktor kontekstual di New York City dengan menggunakan data kode pos menemukan bahwa klaster-klaster dengan test yang lebih rendah dengan proporsi rendah positif Covid-19 merupakan golongan yang memiliki pendapatan dan pendidikan lebih tinggi serta dari kelompok kulit putih. Sementara itu klaster-klaster dengan tingkat pengetesan tinggi dengan proporsi tinggi positif Covid-19 berasal dari kelompok kulit hitam dan mereka tidak memiliki asuransi kesehatan. Hal yang sama terjadi pada etnis hispanik, dan mereka umumnya berasal dari kelompok miskin. Palomino et al (2021) dalam penelitiannya di beberapa wilayah di Spanyol menemukan bahwa ketidaksetaraan antardaerah meningkat dan menggerus kohesi regional di Spanyol, sekalipun dampak yang ditimbulkan masih di bawah perkiraan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kuantitatif deskriptif berdasarkan data sekunder. Hal ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang terjadi di lapangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya yang memerlukan biaya dan tatacara tertentu. Pemilihan formula Indeks Williamsom yang merupakan alat untuk mengukur suatu perbedaan atau disparitas digunakan untuk pengujian di wilayah Jabodetabek karena indeks ini sering digunakan untuk meneliti disparitas. (Hodijah, 2020). Indeks Williamson disajikan dengan dengan rumus sebagai berikut:

$$V = \frac{\sqrt{\sum i(y_i - \bar{y})^2 \times \frac{f_i}{n}}}{\bar{y}}$$

Di mana:

$V$  = Indeks Williamson

$y_i$  = PDRB per kapita di kabupaten/kota  $i$

$y$  = PDRB per kapita rata-rata di Wilayah Jabodetabek

$f_i$  = Jumlah penduduk di kabupaten/kota  $i$

$n$  = Jumlah penduduk di Wilayah Jabodetabek

## Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik yang merupakan data *cross section* yang diterbitkan pada tahun 2021. Penggunaan data ini dipilih karena lebih hemat waktu dan efisien. Data ini juga menjanjikan keakuratan informasi yang disajikan dan banyaknya volume data yang bisa diserap dari lembaga pemerintah tersebut. Data yang ada diolah dengan program excel dan juga dengan SPSS kemudian diinterpretasi sesuai dengan teori disparitas ekonomi. Data yang diambil adalah data pendapatan setiap wilayah tingkat dua kabupaten kota dalam wilayah seluruh Kota

Jakartadan Kabupaten kepulauan Seribu, Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok Kabupaten Tangerang dan Tangerang Selatan, Kabupaten dan Kota Bekasi

### Metode Analisis

Metode dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik yang merupakan data *cross section*. Data diolah dan diinterpretasikan kemudian disajikan dalam laporan ilmiah. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis sektor, subsektor, usaha/ industri atau komoditas unggulan yang menjadi prioritas sebuah daerah digunakan tipologi Klassen. Tipologi ini membagi daerah dengan dua indikator utama, yaitu pertumbuhan dan pendapatan. Rata-rata pertumbuhan ekonomi ditempatkan dalam sumbu vertikal sedangkan rata-rata pendapatan masyarakat ditempatkan dalam sumbu horizontal. Dari data tersebut, akan diperoleh informasi yang membandingkan kontribusi dan tingkat masing-masing sektor dan subsektor:

- Tipologi I: area dengan pertumbuhan dan pendapatan yang tinggi (*high growth and income*).
- Tipologi II: area dengan kategori pendapatan tinggi tetapi pertumbuhannya tertekan (*high income but low growth*).
- Tipologi III: area termasuk kategori pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi memiliki tingkat pendapatan rendah (*high growth but low income*).
- Tipologi IV: area yang relatif tertinggal dalam tingkat pendapatan maupun pertumbuhan ekonomi (*low growth and low income*).

Tabel 1. Distribusi Tipologi Daerah

Kriteria	$Y_{\text{sektor}} \geq Y_{\text{pdrb}}$	$Y_{\text{sektor}} < Y_{\text{pdrb}}$
$R_{\text{sektor}} \geq R_{\text{pdrb}}$	Cepat maju dan cepat tumbuh (prima)	Maju tetapi tertekan (berkembang)
$R_{\text{sektor}} < R_{\text{pdrb}}$	Berkembang cepat (potensial)	Relatif tertinggal

### HASIL DAN PEMBAHASAN

Setelah didapat data dari sumber sekunder maka dilakukan perhitungan untuk mendapatkan indeks Williamson sebagai berikut.

Tabel 2. PDRB Perkapita Tahun 2019 (Pra Covid19)

Kab/ Kota	Jumlah Penduduk	PDRB (dalam Juta)	PDRB per Kapita	Proporsi Penduduk
Jabodetabek	34588530	Rp 2.669.978.000		
Kep Seribu	24295	Rp 3.900.000	160.526.857	0,00072
Jakarta Selatan	2264699	Rp. 421.291.000	186.025.163	0,06697
Jakarta Timur	2937859	Rp 313.551.000	106.727.722	0,08688
Jakarta Pusat	928109	Rp. 452.519.000	487.570.964	0,02745
Jakarta Barat	2589933	Rp. 318.892.000	123.127.509	0,07659
Jakarta Utara	1812915	Rp. 332.844.000	183.596.032	0,05361
Kota Depok	2406826	Rp. 49.077.000	20.390.755	0,07118
Kab Bogor	5965410	Rp. 156.868.000	26.296.265	0,17642

<b>Kota Bogor</b>	1112081	Rp. 32.254.000	29.003.283	0,03289	15.354.704.872.797
<b>Kab Bekasi</b>	3763886	Rp. 251.493.000	66.817.380	0,11131	29.236.048 .885.307
<b>Kota Bekasi</b>	3003923	Rp. 69.409.000	23.106.118	0,08884	67.204.407 .093.943
<b>Kab Tangerang</b>	3800787	Rp. 97.142.000	25.558.391	0,11240	70.545.301.323.20 7
<b>Kota Tangerang</b>	2229901	Rp. 60.145.000	26.972.049	0,06595	36.849.372.657 .966
<b>Kota Tangsel</b>	1747906	Rp. 110.593.000	63.271.709	0,05169	8.286.058.598 .630
<b>Rata-Rata PDRB per Kapita</b>			51.667.998		
					36.673.350
			<b>Indeks Williamson</b>		<b>0,71</b>

Sumber: BPS diolah

Dari perhitungan didapatkan hasil bahwa Indeks Williamson di atas, indeks ketimpangan yang diperoleh sebesar 0,71 saat data diambil secara cross section pada tahun 2019 dari BPS. Data di atas menunjukkan bahwa sebelum adanya pandemi Covid-19. Indeks Williamson yang ditunjukkan di atas secara umum sesuai dengan indeks Williamson Provinsi di Indonesia pada tahun 2013 sampai dengan 2019 (Rido Sanjaya Purba 2020), seperti ditunjukkan gambar di bawah.

Tabel 3. Indeks Williamson Antar Provinsi Indonesia 2013-2019

<b>Tahun</b>	<b>Indeks Williamson</b>
<b>2013</b>	0,709
<b>2014</b>	0,681
<b>2015</b>	0,702
<b>2016</b>	0,700
<b>2017</b>	0,705
<b>2018</b>	0,710
<b>2019</b>	0.734
<b>Rata-rata</b>	0,706

Sumber: diolah Peneliti

Dengan rata-rata nilai indeks Williamson 0,706 ini maka bisa dikatakan wilayah Jabodetabek mempunyai ketimpangan yang cukup besar jika dipadankan dengan ketentuan yang ada pada Gini Ratio maka nilai tersebut dikategorikan sebagai ketimpangan yang tinggi. Kondisi di atas memang sesuai dengan perhitungan yang dilakukan peneliti lain tentang ketimpangan yang terjadi di provinsi-provinsi di Indonesia. Selama sebelum pandemi ditengarai bahwa kondisi ketimpangan antar provinsi di Indonesia relatif tinggi. Hal ini diperkirakan karena adanya klaster-klaster pembangunan baru akibat pemekaran atau otonomi daerah yang sering terjadi setelah periode Reformasi 1998. Pemekaran yang merupakan aspirasi masyarakat tersebut awalnya ditujukan untuk memudahkan pemerataan ekonomi sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Undang-undang tersebut merupakan upaya perbaikan atas banyaknya daerah pemekaran baru yang kurang berhasil dalam rentang waktu 1999-2004. (Sutojo 2015). Pada pembahasan selanjutnya ditampilkan kondisi ketimpangan tabel selanjutnya yaitu hasil perhitungan Indeks Williamson pada tahun 2020 seperti ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. PDRB Perkapita tahun 2020 (saat covid 19)

KAB/KOTA	Jumlah Penduduk	PDRB (dalam juta rupiah)	PDRB/KAPITA	Proporsi Penduduk	Saat Pandemi Covid-19 Tahun 2020
JABODETABEK	33314494	Rp.2.602.067.000			
Kep Seribu	24469	Rp.3.711.000.	Rp. 151.661.286	0,00072	7.389.082.561.389
Jakarta Selatan	2282521	Rp.419.330.000	Rp. 183.713.534	0,06750	1.195.875.950.264.110
Jakarta Timur	2959114	Rp.299.705.000.	Rp. 101.282.005	0,08751	224.689.114.786.986
Jakarta Pusat	931366	Rp.449.615.000.	Rp. 482.747.921	002.754	5.143.523.444.974.650
Jakarta Barat	2619785	Rp.316.204.000.	Rp. 120.698.454	007.748	380.580.346.170.020
Jakarta Utara	1827731	Rp.312.332.000.	Rp. 170.885.103	005.405	781.907.540.733.623
Kota Depok	2484186	Rp.48.132.000.	Rp. 19.375.361	007.347	71.676.240.841.006
Kab Bogor	6088233	Rp.154.097.000	Rp. 25.310.628	018.005	115.248.107.557.438
Kota Bogor	1126927	Rp. 32.084.000.	Rp. 28.470.345	003.333	16.336.697.006.845
Kab Be-kasi	3399017	Rp.243.195.000.	Rp. 62.373.414	011.531	15.953.764.133.372
Kota Bekasi	3075690	Rp.67.638.000.	Rp. 21.991.163	009.096	74.501.765.968. 874
Kab Tangerang	3245619	Rp.93.545.000.	Rp. 28.821.929	0,09598	45.568.248.829.979
Kota Tangerang	1895486	Rp.102.942.000.	Rp. 54.309.027	0,05606	766.681.833.236
Kota Tangsel	1354350	Rp.59.537.000.	Rp. 43.959.833	0,04005	1.771.706.612.598
Rata Rata PDRB/Kapita			Rp. 50.610.756		1.123.730.753.516.970
					33.522.094
			Indeks Williamson		0,66

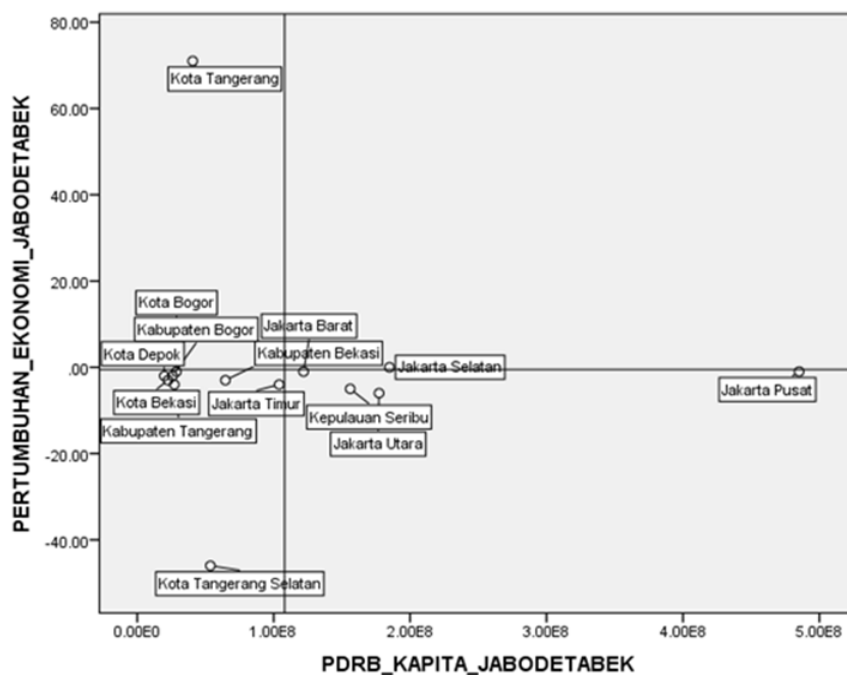
Sumber; BPS diolah

Semua ukuran yang menggunakan data PDRB di atas perhitungannya dengan menggunakan rata rata PDRB dari wilayah Jabodetabek itu sendiri. Biasanya untuk melihat ketimpangan antardaerah maka pembandingan rata-ratanya menggunakan angka daerah yang setingkat lebih tinggi dari daerah yang dinilai. Misal jika untuk melihat kesenjangan kecamatan maka rata-rata pembandingnya adalah data dari PDRB kabupaten di mana kecamatan itu berada. Jika untuk melihat kesenjangan kabupaten maka rata rata pembandingnya adalah data dari PDRB provinsi di mana kabupaten itu berada demikian seterusnya. Pada penelitian ini maka rata-rata PDRB yang digunakan adalah dari ke empat belas wilayah tersebut dengan asumsi bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah dengan kondisi khusus di sekitar Provinsi DKI yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi dan barometer nasional, sehingga angka ekonomi yang dihasilkan oleh wilayah tersebut sudah layak dijadikan untuk menjadi pengukur pada obyek yang saat ini dilakukan penilaian. Selain itu wilayah tersebut merupakan pertemuan fisik dari tiga provinsi yang ada. Ketiganya tentunya akan mempunyai tingkat PDRB yang berbeda, sementara secara spasial wilayah Jabodetabek mengumpul menjadi satu dengan provinsi DKI Jakarta.

### Analisis Tipologi Klassen

Hasil hitungan dari perhitungan data pada tahun 2020 tersebut menunjukkan bahwa Indeks Williamson sebesar 0,66. Hal ini mengalami penurunan sebesar 0,05 poin. Ada sedikit perhatian di sini tentang adanya penurunan tersebut. Pada data yang didapatkan dari BPS memang secara umum terjadi penurunan PDRB di wilayah Jabodetabek kecuali Kota Tangerang. Sedangkan perubahan komposisi penduduk pada tiap tiap daerah tersebut relatif tidak terlalu signifikan. Seperti diketahui data yang digunakan adalah data cross section karena ditujukan untuk mengetahui kondisi sesaat pada saat ada perubahan pembatasan aktivitas ekonomi oleh masyarakat di wilayah Jabodetabek. Pembahasan selanjutnya adalah tentang

tipologi Klassen pada wilayah Jabodetabek saat terjadi pandemi. Mungkin ada yang berpendapat bahwa kondisi pemetaan Tipologi Klassen kurang sesuai dengan kondisi data yang diambil secara cross section karena dianggap kurang bisa memberikan gambaran yang terjadi dari kondisi sebelumnya. Untuk itu penulis mencoba berpendapat bahwa jika kondisi pandemi Covid-19 ini berlangsung dalam jangka waktu lama, maka penelitian ini bisa menjadi tonggak awal untuk meneliti tipologi Klassen dengan data yang lebih banyak di tahun yang akan datang. Keadaan tipologi ini mungkin sedikit berubah walau dalam kondisi yang dianggap kurang stabil mengingat kejadian Covid-19 yang disertai dengan pembatasan aktivitas mulai diberlakukan dalam bulan Maret tahun 2020, sehingga data dianggap belum memenuhi jika diperlukan time series. Namun demikian penulis berusaha melengkapi penelitian ketimpangan dengan Indeks Williamson di atas dengan tipologi Klassen ini. Jadi jika dianggap bahwa data yang diambil tidak apel to apel karena dalam tipologi Klassen diperlukan waktu yang lama sementara dalam indeks Williamson bisa digunakan data sesaat, maka sebagai sebuah tinjauan awal penelitian tetap bisa digunakan hasilnya sebagai pembandingan. Adapun hasil perhitungan dari tipologi Klassen dengan menggunakan aplikasi SPSS disajikan di bawah ini



Gambar 2. Disparitas Ekonomi Jabodetabek dalam Kuadran Tipologi Klassen

Dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa Kota Tangerang berada pada kuadran I yaitu pada kondisi daerah yang cepat maju dan cepat tumbuh (prima). Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Jakarta Timur, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kota Bogor berada di kuadran III yaitu kondisi daerah yang berkembang cepat (potensial). Untuk Jakarta Utara, Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Jakarta Barat, Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat berada pada kuadran IV yaitu daerah dengan kondisi yang

relatif tertinggal. Sedangkan di kuadran II tidak ada daerah yang terwakili kondisinya. Khusus untuk Kota Tangerang pada saat kondisi pandemi Covid-19 ini justru mengalami kenaikan PDRB, dibandingkan dengan kabupaten atau kota yang ada di wilayah Jabodetabek. Tentunya hal ini menjadi perhatian tersendiri mengingat kondisi kota-kota lain di wilayah Jabodetabek mengalami penurunan. Selain itu perhatian diperlukan pada Kota Tangerang karena kenaikan PDRB yang diperoleh dari tahun sebelumnya mencapai angka 70% lebih tentunya hal ini sangat menjadi bahan evaluasi agar bisa ditiru oleh wilayah lain dalam hal kebijakan selama pandemi Covid-19.

## **SIMPULAN**

Disparitas akan selalu terjadi pada setiap periode, wilayah dan kebijakan pengelola wilayah atau negara di manapun. Pembeda adanya disparitas itu sendiri adalah pada seberapa besar disparitas itu terjadi, bukan ada atau tidak adanya disparitas. Tentu di masa pandemi Covid 19 ini kondisi disparitas ekonomi akan terjadi, kejadiannya bisa signifikan, sedang atau kecil. Pada kondisi pandemi Covid-19 ini di wilayah Jabodetabek hampir semua kabupaten dan kota mengalami penurunan PDRB yang signifikan. Artinya dengan adanya pengetatan aktivitas warga ini menyebabkan transaksi ekonomi menurun sehingga produk domestik regional bruto daerah juga menurun antara periode 2019 sampai dengan 2020. Sementara itu kondisi proporsi penduduk relatif tidak berubah, hanya terjadi penurunan sedikit. Dalam perhitungan Indeks Williamson terlihat bahwa pada tahun 2020 saat pandemi terjadi ketimpangan mengalami penurunan dari 0,71 menjadi 0,66 atau menurun 0,05 poin, sebagai hasil dari data cross section pada akhir tahun 2020 atau sekitar kuartal ketiga. Walaupun ini adalah ukuran ketimpangan yang masih bersifat sementara tetapi sangat layak untuk dipelajari dan menjadi bahan evaluasi bagi para akademisi maupun pengambil kebijakan. Pertanyaannya apakah dari angka tersebut merupakan pertanda dari kecenderungan PDRB yang bersama sama dengan jumlah populasi membuat nilai indeks Williamson menurun? Atau ada faktor lain yang masih perlu diteliti lebih lanjut. Pasti naiknya dan turunnya PDRB bisa memberikan kenaikan atau penurunan indeks Williamson. Ada juga seperti Kota Tangerang yang justru mengalami kenaikan PDRB saat pandemi berlangsung. Pada saat terjadi penurunan PDRB hampir di semua wilayah kabupaten dan kota di Wilayah Jabodetabek maka Kota Tangerang justru mengalami kenaikan PDRB. Tentunya banyak hal yang menyebabkan hal ini terjadi, faktor-faktor ekonomi dan non ekonomi bisa jadi menyebabkan Kota Tangerang menjadi meningkat PDRB-nya dan masih perlu analisa yang lebih dalam untuk mendapatkan jawabannya.

Pada perhitungan tipologi Klassen kebanyakan daerah berada pada kuadran III hal ini mungkin bahwa kebanyakan daerah mengalami penurunan PDRB yang cukup signifikan. Kuadran IV lebih banyak diisi oleh kota-kota di Jakarta minus Kota Jakarta Timur kuadran ini dimungkinkan terjadi karena beban berat pertumbuhan yang minus dengan kondisi perekonomian yang mengalami kontraksi akibat dari pengetatan aktivitas oleh pemerintah.

Penelitian ini masih tahap awal untuk memberikan gambaran ketimpangan di wilayah Jabodetabek, karena keterbatasan waktu dalam mendapatkan data yang lebih banyak, masih menggunakan dua jenis metodologi perhitungan yang perlu ditambahkan lagi metodologi lain

yang berkaitan dengan analisis ketimpangan wilayah, spasial dan tentunya terkait dengan ekonomi regional.

### Rekomendasi

Dalam penelitian dengan data cross section ini disarankan untuk diulangi lagi bagi daerah-daerah yang secara spasial mirip dengan Jabodetabek, seperti daerah Gerbangkertasusila yaitu Gersik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya dan Lamongan. Hal ini dikarenakan daerah Gerbangkertasusila memiliki kemiripan dengan Jabodetabek secara ekonomi, jumlah penduduk, tingkat pendidikan dan merupakan daerah pusat dalam hal ini adalah Jakarta dan Surabaya yang dikelilingi kota-kota satelit, sama-sama di Pulau Jawa serta memiliki geografis dataran dan perairan. Hasilnya agar bisa dibandingkan untuk mengetahui pola-pola kegiatan penduduk antara kedua daerah tersebut agar bisa dipakai untuk membuat kebijakan preventif dan kuratif bila terjadi wabah lagi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Aida, Nelia (2012) Pengaruh Spillover Effect Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Sumatera Selatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung. Diterbitkan dalam buku Pembangunan Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, prosiding seminar nasional, Magister Teknik Sipil Unila 2012.
- Arsyad, Lincolin. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. 5 ed. UPP STIM YKPM Yogyakarta: UPP STIM YKPM Yogyakarta.
- BPS RI. 2021. 1 *Produk Domestik Regional Bruto Kab/Kota di Indonesia 2016–2020*. Jakarta.
- Dhyatmika, Ketut Wahyu, and Hastarini Dwi Atmanti. 2013. "Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Banten Pasca Pemekaran." *Diponegoro Journal Of Economics* 2: 2.
- Firdaus, Muhammad (2013) Ketimpangan Pembangunan Antarwilayah di Indonesia: Fakta dan Strategi Inisiatif. Orasi ilmiah guru besar tetap Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institute Pertanian Bogor.
- Garnesia, Irma. 2020. "Lebarnya Jurang Ketimpangan Sosial-Ekonomi Saat Pandemi COVID-19." *tirto.id*. <https://tirto.id/lebarnya-jurang-ketimpangan-sosial-ekonomi-saat-pandemi-covid-19-f5St>.
- Ginsburgh, V., Magerman, G. & Natali, I. 2021. COVID-19 and the role of inequality in French regional departments. *Eur J Health Econ* 22, 311–327 . <https://doi.org/10.1007/s10198-020-01254-0>
- Harefa, Felix Kurniawan. 2016. *Analisis Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Kecamatan pada Daerah Otonomi BARU (Studi Kasus: Kota Gunungsitoli Provinsi Sumatera Utara)*. Medan.
- Jack Cordes, Marcia C. Castro. 2020. Spatial analysis of COVID-19 clusters and contextual factors in New York City, *Spatial and Spatio-temporal Epidemiology*, Vol 34, ISSN 1877-584
- Maria Christina Yuli Pratiwi. 2017. Efek Limpahan dan Analisis Pusat Pertumbuhan Provinsi Kalimantan Tengah. *Jurnal Kebijakan Pembangunan* Vol 12 Nomor 2 243 – 263
- Nasution, Dito Aditia Darma, Erlina Erlina, and Iskandar Muda. 2020. "Dampak Pandemi COVID-19 Terhadap Perekonomian Indonesia." *Jurnal Benefita* 5(2): 212.

- Pepinsky, Thomas B., and Maria M. Wihardja. 2011. "Decentralization and Economic Performance in Indonesia." *Journal of East Asian Studies* 11(3): 337–71.
- Pontifex, Daniel, and Yoseph Silitonga. 2010. "Tahapan Perkembangan Metropolitan Jabodetabek Berdasarkan Perubahan Pada Aspek Lingkungan." *Journal of Regional and City Planning* 21(3): 197–214.
- Pratiwi, Angela Gerda, and Lutfi Muta'ali. 2013. "Perkembangan Ekonomi Wilayah Dan Peran Sektor Tersier Di Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Dan Bekasi (Jabodetabek)." *Jurnal Bumi Indonesia* 53(9): 1689–99..
- Palomino, Juan C. and Rodriguez, Juan Gabriel and Sebastian, Raquel, The COVID-19 Shock on the Labour Market: Poverty and Inequality Effects across Spanish Regions (January 28, 2021). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3775091>
- Rido Sanjaya Purba. 2020. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kabupaten Di Provinsi Sulawesi Barat*. Fak Ekonomi & Bisnis Universitas Sumatera Utara . <http://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/30515/160501084.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.
- Sutojo, Adi. 2015. Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Dalam Perspektif Otonomi Daerah (Suatu Tinjauan Empirik Di Kabupaten Bengkulu Tengah)." *Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik* 4(4): 1–15.
- Taufik Hidayadi. 2003. Analisis Disparitas Ekonomi Dan Sosial Pada 26 Provinsi Diindonesia Periode 1995-2000. <http://repository.unair.ac.id/45965/>. <http://lib.unair.ac.id/>.
- Todaro, Michael P., and Stephen C. Smith. 2012. *Economic Development*. New York University
- WHO. 2018. Health inequities and their causes. [internet] diakses mei 2022 tersedia pada <https://www.who.int/news-room/facts-in-pictures/detail/health-inequities-and-their-causes#:~:text=The%20lower%20an%20individual's%20socio,both%20to%20individuals%20and%20societies>.